



## KONFLIK INDONESIA-BELANDA: UPAYA MENGEMBALIKAN IRIAN JAYA KEDALAM PANGKUAN IBU PERTIWI

Cut Siti H, Huddy Husin  
Pendidikan Sejarah Universitas Indraprasta PGRI  
Email: [cutsiti0780@gmail.com](mailto:cutsiti0780@gmail.com)

### **Abstract**

*This research departs from the shifting issues regarding post-cold war security, in the form of the application of national and state insight in defending every territory of Indonesia by the Indonesian military institution. The conflict over West Irian between Indonesia and the Netherlands seemed to have reached a stalemate between the two sides, after various attempts to resolve the issue through diplomacy that had been held. This article aims to explain the nation and state process of the Republic of Indonesia after independence, because in accordance with the principles of the 1945 Constitution, Indonesia through the Indonesian National Army has an obligation to protect each of its territories. Writing articles using Dutch colonial government archives (collection of the National Archives of the Republic of Indonesia) and newspapers (collection of the National Library of Indonesia). This study uses a structuralistic approach that emphasizes the agency's ability, namely the Indonesian National Armed Forces, in carrying out military strategies to regain the territory of West Irian from the lap of the motherland. This study obtained results in the form of insights in the form of decisive military actions and strategies to strengthen diplomatic channels and win the sympathy of the people of Irian Jaya to vote for Indonesia in the Pepera (Determination of People's Opinion) events from 14 July to 02 August*

**Keywords:** *Indonesian national army, Irian Jaya, military*

### **Abstrak**

Penelitian ini berangkat dari isu-isu pergeseran mengenai keamanan pasca perang dingin, dalam bentuk pengaplikasian wawasan kebangsaan dan kenegaraan dalam mempertahankan setiap wilayah Indonesia oleh sebagian militer Indonesia. Konflik perebutan Irian barat antara Indonesia dan Belanda seakan menemui jalan buntu antara kedua belah pihak, setelah berbagai upaya penyelesaian masalah tersebut melalui jalur diplomasi yang telah diselenggarakan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan proses berbangsa dan bernegara dari Republik Indonesia pasca kemerdekaan, karena sesuai dengan prinsip UUD 1945 maka Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi setiap wilayahnya. Penulisan artikel yang menggunakan sumber-sumber arsip pemerintahan sebagian Belanda (koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia) dan surat kabar (koleksi Perpustakaan Nasional). Penelitian ini menggunakan pendekatan strukturalistik yang menekankan kemampuan *agency* yakni Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan strategi militer untuk mendapatkan sebagian wilayah Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi. Penelitian ini mendapatkan hasil dalam bentuk wawasan berupa aksi dan strategi militer yang menentukan untuk memperkuat jalur sebagian dan meraih simpati masyarakat Irian Jaya untuk memilih Indonesia dalam peristiwa Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) 14 Juli sampai dengan 02 Agustus 1969.

**Kata Kunci:** Irian Jaya, militer, Tetara Nasional Indonesia



## WIKSA: PROSIDING PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

### PENDAHULUAN

Status Irian Barat sesudah proklamasi kemerdekaan politis yuridis semakin kokoh, karena proklamasi kemerdekaan yang telah diumumkan ke seluruh dunia itu tegas menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah meliputi Irian Barat. Irian Barat merupakan sebuah provinsi terluas di Indonesia yang terletak di tepi bagian barat pulau Irian. Nama Irian dikenal juga dengan sebutan West New Guenea. Wilayah Irian Barat merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah terutama dalam bidang pertambangan yaitu tembaga dan emas.

Pasca kemerdekaan Indonesia, Belanda bersikeras bahwa wilayah yang terdapat di bagian timur Indonesia bukanlah wilayah Republik Indonesia. Belanda berupaya untuk menanamkan sebuah pemahaman bahwa masyarakat Indonesia merupakan etnis melayu, sedangkan Irian Barat tidak termasuk ke dalam etnis masyarakat Indonesia karena bukan etnis melayu. Proses pembebasan Irian Barat membutuhkan proses

yang panjang dan memakan waktu yang sangat lama.

Pembebasan Irian Barat tidak bisa dipisahkan dari politik Indonesia, tetapi penentu langkah keberhasilan persengketaan tanah Irian Barat ini adalah perjuangan diplomasi yang diimbangi dengan kekuatan militer. Belanda bersikeras merebut wilayah Irian Barat melalui Perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November 1946. Dalam perjanjian tersebut, pihak Belanda hanya mengakui *de facto* wilayah Indonesia yang meliputi Jawa, Sumatra, dan Madura. Merujuk pada perjanjian ini, pada Desember 1946 hingga awal 1947, Belanda membentuk Negara Indonesia Timur. Pada tahun yang sama, Belanda bermanuver dalam diplomasi politiknya dengan memberikan ultimatum ke Indonesia agar kedaulatan Belanda diakui di Indonesia, karena ultimatum ini ditolak sehingga menyebabkan terjadinya Agresi Militer Belanda I.

Setelah Perjanjian Linggarjati tidak membuahkan hasil yang maksimal, akhirnya pihak Belanda dan Indonesia Kembali melakukan perjanjian, yaitu perjanjian Reville. Perjanjian ini



## WIKSA: PROSIDING PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

diadakan tahun 1948, dalam perjanjian ini, Indonesia diminta mengakui Garis Van Mook atau garis khayal yang digunakan untuk membatasi wilayah yang diklaim oleh Belanda dan mendukung agar Irian Barat dapat lepas dari Indonesia. Hal ini ditolak oleh Indonesia sehingga menyebabkan Agresi Militer Belanda II. Dari perjanjian tersebut tidak ada hasil yang menengahi antara pihak Belanda dan pihak Indonesia yang terjadi pada akhirnya adalah hanya Agresi Militer yang Belanda lakukan yaitu I dan II. Setelah itu dilakukan Persetujuan Roem Royen pada tanggal 17 April pada tahun 1949, namun hasil tetap *dead lock*.

Indonesia bersikeras bahwa Irian Barat adalah bagian wilayah Republik Indonesia, tetapi Belanda tidak menyetujui status tersebut. Diplomasi yang dilakukan selanjutnya adalah Konferensi Meja Bundar (KMB). Konferensi ini diadakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus-2

November 1949. Dalam perjanjian ini Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya kecuali wilayah Irian Barat yang akan dikembalikan pada dalam jangka waktu setahun kemudian. Irian Barat disebut *The Residency of New Guinea* Belanda seolah menunjukkan bawah Irian Barat bukan bagian dari Indonesia. Belanda masih memiliki kepentingan untuk menguasai Irian Barat. Akibatnya, Belanda tidak mau meninggalkan wilayah tersebut. Belanda memiliki kepentingan untuk menjadikan Irian Barat tetap menjadi koloninya. Selain itu Belanda juga ingin menjadikan Irian Barat sebagai tempat penampungan sebagian penduduknya. Masyarakat Belanda yang tinggal di Republik Indonesia Serikat memerlukan tempat tinggal yang baru dikarenakan terjadi perubahan status politik Hindia Belanda.

Pada tanggal 19 Desember 1961, Panglima Tertinggi Angkatan



## WIKSA: PROSIDING PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Perang Republik Indonesia yaitu Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora. Tri Komando Rakyat (TRIKORA) merupakan suatu perintah kepada Rakyat Indonesia untuk melaksanakan perjuangan Pembebasan Irian Barat secara resmi. Bentuk keseriusan pemerintah terhadap langkah ini adalah yang pertama pembentukan Komando Mandala. Panglima yang ditunjuk langsung oleh Soekarno ialah Mayor Jenderal Suharto, sebelum Komando Mandala mempersiapkan dan melaksanakan operasinya, sudah terjadi penyusupan-penyusupan yang dilakukan oleh para gerilyawan. Operasi *Silent Operation* pertama melalui jalur laut pada tanggal 15 Januari 1962, dengan menyusupkan pasukan ke Irian Barat yang dilakukan di Laut Aru. Dalam pertempuran ini gugur Komodor Yos Sudarso dan Kapten Wiratno serta tenggelamnya kapal MTB Macan Tutul dikarenakan mendapatkan serangan bertubi-

tubi oleh kapal militer Belanda. Akibat dari peristiwa ini Indonesia akhirnya melancarkan serangan tanpa henti serta kesiapan Indonesia dalam membuat strategi yang matang untuk melancarkan serangan. Dengan situasi terdesak seperti ini Belanda menyatakan kesediaannya untuk melakukan perundingan dengan Indonesia dalam memperjuangkan Irian Barat. Dunia Internasional ikut dalam perundingan terhadap permasalahan Irian Barat. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1962 ditandatangani, Perjanjian New York antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda yang ada di New York. Berdasarkan Perundingan New York, maka pada tanggal 14 Juli sampai 2 Agustus 1969, diselenggarakan Pepera (penentuan Pendapat Rakyat). Untuk menyelenggarakan dibentuk Dewan Musyawarah Pepera yang berada di setiap kabupaten di Irian Barat. Musyawarah diselenggarakan dengan dinamai *Act Of Free*



## WIKSA: PROSIDING PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

*Choice* atau penentuan nasib sendiri rakyat Irian Barat telah bersepakat untuk Bersatu dan berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **METODE PENELITIAN**

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode sejarah, yang terbagi dalam empat tahap yakni : Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Penulisan (Gottschalk, 1985). Sumber-sumber yang digunakan dalam penyusunan artikel ini menggunakan arsip yang berasal dari koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia *Bundel Algemene Secretarie*.

Dalam melengkapi sumber primer yang digunakan dalam penulisan artikel ini, digunakan pula buku-buku sebagai sumber pendukung penulisan, agar mampu mendukung pendekatan strukturistik yang digunakan dalam artikel ini. Pendekatan strukturistik yang digunakan dalam artikel ini, diambil dari teori *Agency* yang

dijelaskan oleh Anthony Giddens (1984).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Trikora; Perencanaan dan Pelaksanaan**

Pada tanggal 03 Mei 1956 Indonesia membatalkan hasil-hasil dari Konferensi Meja Bundar secara sepihak (ANRI, *Korte Verlag Betreffende Nieuw-Guinea*, 1949: 2). Setelah peristiwa tersebut pada tanggal 17 Agustus 1956 Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dan otonomi daerahnya. Setahun kemudian tepatnya pada tanggal 18 November 1957 diadakan Rapat Majelis Umum Pembebasan Irian Barat. Upaya Indonesia untuk menekan Belanda dengan kekuatan militer telah dilaksanakan sejak tahun 1960. Kepala staf Angkatan Darat yaitu A. Nasution memutuskan untuk meningkatkan aksi-aksi Pembebasan Irian Barat maka dibentuklah Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) dengan A. Nasution sebagai ketua dan mempunyai organisasi dari

tingkat pusat hingga ke daerah. Organisasi ini dimulai dari tingkat Pusat, Swantatra tingkat I, dan Swantantra tingkat II (Leirissa, 1992:26).

Front Nasional ini adalah badan semi resmi yang membantu dan mendorong segala usaha kegiatan Pemerintah pada umumnya dan Penguasa Perang Pusat pada khususnya dalam rangka perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Dibentuklah Team Operasi Khusus dengan 3 Operasi yaitu Operasi A ditugaskan untuk mengadakan infiltrasi ke Irian Barat melalui Maluku Utara. Operasi B untuk membina putra-putra Irian Barat. Operasi C untuk mendekati kelompok-kelompok penting di Pemerintahan belanda dengan tujuan untuk mempengaruhi sehingga mengubah pendiriannya mengenai Irian Barat. Rencana ini tetap dilaksanakan oleh Organisasi khusus yaitu FNPIB. Rencana tersebut dibahas dalam rapat Gabungan Kepala Staff dari

ketiga angkatan tepatnya pada bulan April 1961 (Bhakti, 2018:89).

Tindakan selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah membentuk sebuah komando khusus dalam rangka pembebasan Irian barat, yaitu Komando Operasi Tertinggi (KOTI) dengan Presien Soekarno sebagai panglima besar. Tugas komando adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menyatukan Irian Barat dengan Republik Indonesia. Kemudian tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta Soekarno berpidato "*Oleh karena masih ada salah satu wilayah daripada Republik Indonesia diduduki oleh pihak asing, oleh karena salah satu wilayah dari Republik Indonesia masih belum merdeka kita anggap sebagai suatu kewajiban yang keramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak asing itu kebawah kekuasaan Republik Indonesia*", akhirnya Soekarno membentuk strategi baru dalam bentuk Tri Komando Rakyat (TRIKORA).



## WIKSA: PROSIDING PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Isi dari TRIKORA sendiri adalah pertama mengagalkan pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda Kolonial. Kedua, kibarkan Sang Saka Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia. Ketiga, bersiaplah untuk Mobilisasi Umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa (M. Cholil, 1971:27). Operasi ini adalah operasi amfibi terbesar yang pernah dilakukan Indonesia. Organisasi KOTI diresmikan dengan nama Komando Mandala (KOLA) dengan Jenderal Soeharto sebagai panglima mandala. Dalam upaya melaksanakan tujuan tersebut, Komando Mandala membuat strategi dengan membagi operasi pembebasan Irian Barat menjadi 3 fase, yaitu Fase Infiltrasi, Fase Eksploitasi dan Fase Konsolidasi (A. Sudirman, 2014:324).

Rencana-rencana dapat dilaksanakan beberapa bulan kemudian. Kurang matangnya strategi di awal tahun 1962 nampak

dari insiden Laut Aru pada 15 Januari 1962 malam hari. Pada malam tersebut terdapat operasi militer yang dinamakan *Silent Operation* dimana operasi tersebut menyebabkan kapal MTB Macan Tutul tenggelam. Ada spekulasi menunjukkan bahwa ketidakjelasan pelaksanaan Operasi Sandi Lintas dan *Silent Operation* menyebabkan tenggelamnya kapal tersebut serta menggugurkan Komodor Yos Sudarso. Karena peristiwa ini membuat KOTI Khususnya Komando Mandala memantapkan strategi dan kembali menggelar operasi militer. Operasi militer pertama yang dilakukan adalah Operasi Infiltrasi dilakukan dalam jangka waktu 10 bulan, pasukan militer yang berhasil masuk dan membentuk kantong-kantong daerah bebas Republik Indonesia di Irian Barat. Tujuan gerakan-gerakan ini ialah untuk menciptakan dan mempertahankan daerah-daerah bebas tersebut serta menyusun strategi saat pasukan sudah mendarat di daerah lawan selain itu

dapat mengikat kekuatan-kekuatan Belanda setempat sehingga membuat pasukan Indonesia tidak mudah dihancurkan secara parsial oleh musuh. Dalam operasi ini pasukan harus dapat menundukkan lawan dan mengembangkan penguasaan wilayah dengan membawa serta masyarakat Irian Barat (Bhakti, 2018:96).

Operasi kedua adalah Operasi Eksploitasi dilaksanakan pada awal tahun 1963 dengan adanya pertimbangan bahwa apabila perjuangan diplomasi menang, tahap perjuangan ini selesai dilaksanakan. Operasi ini dilaksanakan secara terang-terangan atau secara terbuka oleh militer dalam menguasai inti dari militer lawan, serta menduduki pos pertahanan musuh yang vital, lalu menguasai daerah lawan. Tujuan dari operasi ini adalah melumpuhkan inti kekuatan militer sedemikian rupa, sehingga seluruh wilayah Irian Barat dapat dikembalikan kepada Republik Indonesia (M. Cholil, 1971:48). Tahap terakhir adalah Konsolidasi, dalam tahap ini adalah mengadakan

konsolidasi kekuasaan Republik Indonesia di seluruh wilayah Provinsi Irian Barat.

### **B. Diplomasi New York dan Pepera 1969**

Upaya yang telah Indonesia lakukan melalui konfrontasi dalam bidang militer terhadap Belanda dengan menggunakan upaya militer dari darat, laut dan udara telah memberikan hasil yang positif dan permasalahan Irian Barat memiliki pengaruh perkembangan dalam bidang politik. Hubungan yang semakin memanas antara Indonesia dengan Belanda, dunia internasional memberikan perhatian akibat dari sengketa antara Indonesia dan Belanda. PBB secara tidak langsung mencoba untuk memprakarsai perdamaian untuk meredakan ketegangan. Dalam masa memanasnya muncul suatu usul perdamaian, terkenal dengan usul Bunker. Bunker bertindak sebagai penengah, setelah sebulan hampir menemui jalan buntu, bunker mengusulkan sebuah proposal yang dikenal dengan "Bunker Plan".





## WIKSA: PROSIDING PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Dalam proposal ini berisi tentang keharusan Belanda untuk melepaskan wilayah Irian Barat untuk kemudian diikuti dengan referendum yang dilakukan oleh masyarakat Irian Barat. Tetapi Belanda masih menunda rencana ini setelah mempelajari dengan seksama, Presiden Soekarno memutuskan bahwa rencana bunker itu harus didukung karena persetujuan penyerahan Irian Barat kepada Indonesia akan menjadi dasar dalam rencana tersebut. Dari dalam negeri Belanda "Bunker Plan" dianggap sebagai kekalahan dan masyarakat Belanda menolak melepaskan wilayah Papua Barat (Saltford, 2005:18). Tetapi Belanda tetap melanjutkan perundingan ditengah keadaan tekanan dari AS untuk menindaklanjuti "Bunker Plan". Pada akhirnya mencapai sebuah kesepakatan pada tanggal 15 Agustus 1962. Dalam perjanjian ini mengenai peralihan kekuasaan dari Belanda kepada Indonesia yang dilaksanakan melalui Pemerintahan

Sementara atau UNTEA. Perjanjian ini berfungsi untuk memberi sebuah penegasan hak dan kewajiban antara pihak Belanda dan Indonesia serta para pihak terkait.

Perjanjian ini menjadi tumpuan harapan bagi Belanda dan Indonesia, Belanda berharap melalui perjanjian ini dapat menyelamatkan prestisnya walaupun harus kehilangan Irian Barat, menjalankannya dengan cara yang terhormat yang dilakukan melalui UNTEA. Bagi Indonesia berharap melalui perjanjian ini menjadi jalan untuk penyerahan Irian Barat dari Belanda kepada Indonesia secara damai. Diplomasi ini diharapkan bisa menjadi sebuah teladan untuk memupuk solidaritas kebangsaan atau nasionalisme Indonesia, disamping itu mewujudkannya harapan bangsa Indonesia dengan kembali utuhnya Indonesia melalui penyerahan wilayah Irian Barat (Siswanto, 2020:144).

Irian barat adalah bagian dari wilayah NKRI yang sah, masuknya

Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia merupakan hasil dari perjanjian secara damai yang di mediasi oleh PBB. Perjanjian tersebut adalah Perjanjian New York yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962 dalam perjanjian ini dengan melaksanakan *act of free choice*. Respon rakyat Papua yang muncul ke permukaan terhadap Pepera terbagi menjadi dua kelompok yaitu pro Integrasi ke Republik Indonesia dan pro kemerdekaan Papua. Rakyat yang pro terhadap kemerdekaan atas Papua pada saat itu adalah masyarakat yang ada di pedesaan hanya mengenal dengan Belanda sejak kedatangan Belanda sehingga susah untuk mengubah pemikiran masyarakat Papua dalam waktu singkat (Makatita, 2005:42).

Pelaksanaan penentuan pendapat umum diserahkan kepada Departemen Dalam Negeri. Tugas itu menjadi tugas nasional pertama untuk menteri yang baru saja dilantik menjadi Menteri Dalam Negeri pada tahun 1969. Sebelum Pepera

dilaksanakan, ada 2 dewan yang akan dibentuk di setiap kabupaten. Pertama adalah DPRD Tingkat II dan yang kedua yaitu Dewan Musyawarah Pepera. Penentuan Pendapat Rakyat harus dilaksanakan oleh dewan tersendiri setelah mengadakan “konsultasi dengan dewan lokal”. Ditetapan pula bahwa semua dewan telah selesai dalam pembentukannya pada tanggal 10 Juli 1969 agar bisa melaksanakan Pepera lebih cepat. Pelaksanaan Pepera diadakan antara pertengahan Juli sampai dengan awal Agustus 1969. Setelah melaksanakan Pepera di seluruh delapan kabupaten, pada tanggal 05 Januari 1969 diadakan sidang paripurna DPRD Tingkat I Irian Barat di Jayapura. Hasil dari Pepera juga dilaporkan kepada Sekjen PBB U Thant. Pada tanggal 16 Agustus 1969 presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat untuk dibicarakan kepada DPR dan dijadikan Undang-Undang (Leirissa, 1992:65).



## KESIMPULAN

Peristiwa pembebasan Irian Barat merupakan peristiwa yang memiliki alur diplomasi yang sulit dikarenakan banyaknya diplomasi politik dan juga perundingan yang telah dilakukan tetapi tetap tidak menghasilkan apa-apa. Dari upaya tersebut diplomasi yang dilakukan Indonesia mencapai batasnya dan memilih jalan keluar sendiri dengan melakukan konfrontasi militer. Dengan mendapat bantuan melalui dana yang diberikan oleh Uni Soviet, Indonesia pada saat itu mampu mengimbangi dalam segi persenjataan dan juga kekuatan militer yang dimiliki oleh Belanda. Sehingga terwujudnya harapan yaitu pengembalian wilayah Irian Barat kepada Republik Indonesia. Dengan Perjanjian New York yang menyebutkan Irian Barat diserahkan kepada Indonesia di Papua dengan nama UNTEA, disisi lain Pemerintah Indonesia wajib melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)

sebagai referendum bagi masyarakat Irian Barat sebelum akhir tahun 1969.

## DAFTAR PUSTAKA

- ANRI, *Kort Verslag over de behandeling en stand van zaken betreffende Nieuw-Guinea* t/m 04 Oct 1949.
- Anwar, S. 2018. *Dukungan Kelompok Masyarakat Terhadap Trikora Dan Pelaksanaan Mobilisasi Umum Di Jawa Tengah 1961-1962*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Bupu, T. N. dan Sumarjiana, I.K.L. 2021. *Jurnal Santiaji Pendidikan. Operasi Trikora Sebagai Upaya Mengembalikan Irian Barat Ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Vol. 11. No 1. Hal 11-12.
- Cholil, M. 1971. *Sedjarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat*. Jakarta: Departemen Pertahanan.
- Gottschalk, L. 1985. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press
- Kaeseno. 2011. *Jurnal Sejarah Citra Lekha. Dinamika Politik Indonesia Dalam Perjuangan Diplomasi Pembebasan Irian Barat 1949-1963*. Vol XV. No 1. Hal 63
- Leirissa, R. Z., Dkk. *Sejarah Proses Integrasi Irian Jaya*. Jakarta:

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Loha, B. *Djalannya Revolusi Indonesia Membebaskan Irian Barat*. Jakarta: Perusahaan Percetakan Negara.
- Makatita, Y. I. M. 2005. *Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat Di Papua Barat Tahun 1969*. Skripsi. Universitas Sanata Dharma.
- Salford, J. 2003. *The United Nations And The Indonesian Takeover Of West Papua 1962-1969*. USA: RoutledgeCurzon.
- Siswanto. 2020. *Diplomasi Belanda Dan Indonesia Dalam Sengketa Irian Barat 1949-1950*. Jakarta: Lipi Press.
- Surdiman, A. 2014. *Sejarah Lengkap Indonesia Dari Era Klasik Hingga Terkini*. Yogyakarta: Diva Press.
- Wihardyantie, F. S., Wawan, D., dan Ayi. B. S. 2018. *Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah. Keterlibatan Amerika Serikat Dalam Penyelesaian Konflik Irian Barat 1960-1963*. Vol 11. No 1. Hal 15-16.
- Zahidi, M. S. dan Hafid, A. P. 2020. *Jurnal Dauliyah. Pola Relasi Hukum Internasional Dan Negara Pada Perundingan Masalah Papua Barat Tahun 1950-1962*. Vol 5. No 1. Hal 84.